



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

# **2025**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat, Kasih sayang dan IjinNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

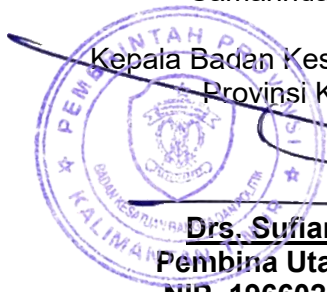
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi, diberi amanah oleh pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung kemajuan pembangunan Kalimantan Timur, maka bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tersebut berupa laporan kinerja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014.

Pelaporan kinerja ini bertujuan memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik yang menyangkut substansi isi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak, guna perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami untuk masa-masa yang akan datang.

Samarinda, 02 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur



**Drs. Sufian Agus, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196602041988031016

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran, dengan kategori capaian **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sumber Daya Manusia.....	5
E. Aspek Strategis Organisasi .....	6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	7
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya ..	21
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	24
C. Analaisi Capaian Kinerja .....	27
D. Realisasi Anggaran .....	87
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim .....	92
B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang .....	92
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	4
Gambar 3.1 Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik.....	37
Gambar 3.2 Kegiatan FGD IDI.....	38
Gambar 3.3 Kegiatan FGD Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) .....	38
Gambar 3.4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi FPK.....	57
Gambar 3.5 Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Organisasi Kepemudaan, Pemuka Masyarakat, Dan Bagi Mahasiswa .....	57
Gambar 3.6 Kegiatan Pembentukan Karakter Bagi Usia Dini .....	58
Gambar 3.7 Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas .....	58
Gambar 3.8 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat .	59
Gambar 3.9 Kegiatan Fasilitasi Rapat Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi di Provinsi Kalimantan Timur .....	59
Gambar 3.10 Kegiatan Ngobrol Anti Korupsi (Ngopi).....	59
Gambar 3.11 Kegiatan Pelatihan Mediator bagi Tokoh Agama.....	60
Gambar 3.12 Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya .....	60
Gambar 3.13 Kegiatan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Daerah .....	61
Gambar 3.14 Kegiatan Sosialisasi P4GN & PN kepada Pemuda, Tokoh Agama dan Ormas.....	61
Gambar 3.15 Kegiatan Rapat Tim Terpadu Percepatan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Kaltim.....	61
Gambar 3.16 Kegiatan Rapat FORKOPIMDA.....	62
Gambar 3.17 Kegiatan Rapat Timdu PKS Prov.Kaltim .....	62
Gambar 3.18 Kegiatan Rapat Tim Wasdin Prov.Kaltim.....	63
Gambar 3.19 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Intelijen....	63
Gambar 3.20 Kegiatan Rapat Tim FKDM .....	63
Gambar 3.21 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025.....	72
Gambar 3.22 Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	81
Gambar 3.23 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I-IV Tahun 2025 .....	82

Gambar 3.24 Rapat Pembahasan Penyusunan dan Reviu Laporan Kinerja (LKJIP) Tahun 2025 sebagai bagian dari pemenuhan komopnen Pelaporan Kinerja .....	83
Gambar 3.25 Rapat Reviu Internal atas Implementasi SAKIP.....	84
Gambar 3.26 Kegiatan Pendampingan dan Validasi Pengisian Aplikasi E-SAKIP Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan pengelolaan data kinerja .....	85

## DAFTAR TABEL

Table 1.1	Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan .....	5
Table 1.2	Rekap PNS berdasarkan Pendidikan dan Gender .....	6
Table 1.3	Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	7
Table 1.4	Sarana dan Prasana Kerja .....	9
Table 2.1	Perencanaan Strategis .....	12
Table 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran .....	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama .....	17
Table 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
Table 2.5	Target Belanja Badan Kesbangpol Tahun 2025.....	19
Table 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .....	20
Table 3.1	Hasil Evaluasi Tahun 2024 .....	21
Table 3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025 .....	22
Table 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Table 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	25
Table 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Per Triwulan Tahun Anggaran 2025.....	26
Table 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	27
Table 3.7	Sumber Data Penilaian IDI pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi .....	29
Table 3.8	Hasil penilaian skor Aspek Indeks Kapasitas Lembaga Dekomrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 .....	30
Table 3.9	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ....	31
Table 3.10	Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 .....	31
Table 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra .....	32
Table 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/Standar Nasional Tahun 2025 .....	32
Table 3.13	Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 .....	34

Table 3.14 Rincian Bantuan Keuangan Intansi Vertikal (Pemerintah Pusat) tahun 2025 .....	35
Table 3.15 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran..	36
Table 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	38
Table 3.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	40
Table 3.18 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ....	40
Table 3.19 Daftar Data Potensi Konflik Tahun 2025 .....	41
Table 3.20 Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 .....	49
Table 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra .....	50
Table 3.22 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 .....	53
Table 3.23 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	64
Table 3.24 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	65
Table 3.25 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ....	65
Table 3.26 Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 .....	66
Table 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra .....	67
Table 3.28 Nilai Interval, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	67
Table 3.29 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 .....	69
Table 3.30 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	72
Table 3.31 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ....	74
Table 3.32 Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 .....	75
Table 3.33 Hasil Penilaian Per Komponen AKIP .....	75
Table 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra .....	77
Table 3.35 Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	78
Table 3.36 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 .....	80
Table 3.30 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Data Dukung Capaian Kinerja Tahun 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peranan yang penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya upaya untuk mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar pembentukan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah, dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan melalui Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan mengacu pada dokumen perencanaan serta berdasarkan pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Kesbangpol atas kinerja yang dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LKjIP akan memberikan kondisi obyektif pada tahun 2025, perencanaan strategis, target

dan pencapaian kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

## **B. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.

Pada BAB XXXIV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

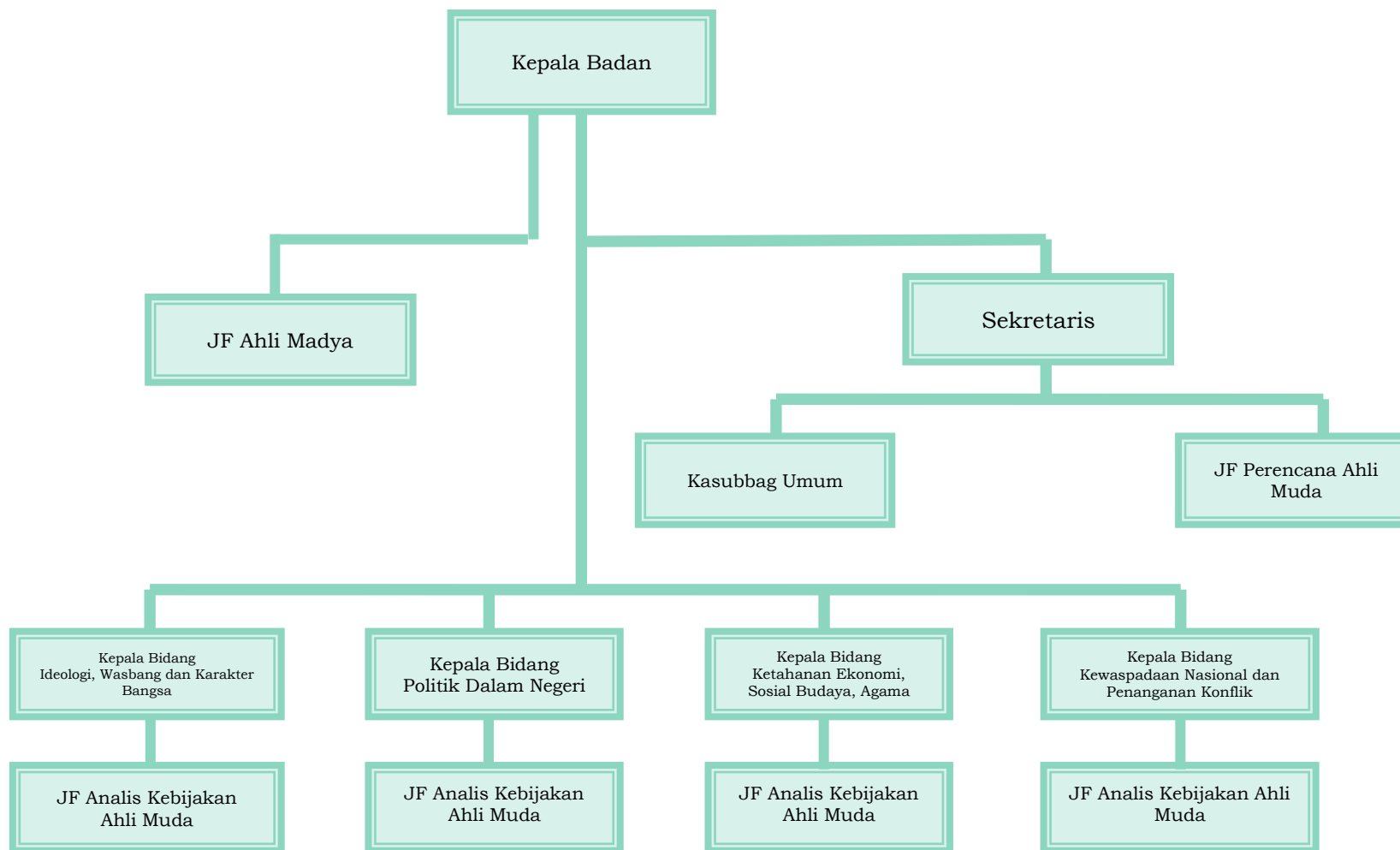
- a. perumusan kebijakan Teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

### **C. Struktur Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Umum dan 4 (empat) Bidang. STOK Badan Kesbangpol Prov Kalimantan Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur



#### D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2025 mempunyai personel sebanyak 50 orang terdiri dari 6 pejabat struktural, 9 fungsional, 36 orang pejabat pelaksana terdiri dari PNS 24 orang dan PPPK 12 orang.

Komposisi jabatan dalam struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2025 antara lain : 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4 Jabatan Administrator, serta 1 Jabatan Pengawas.

Adapun rekapitulasi pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Table 1.1 Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JPT Pratama	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Administrator	3	1	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Pengawas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Fungsional	5	4	2	7	0	0	2	7	0	0	0	0
Pelaksana PNS	18	5	0	15	8	0	0	8	2	13	0	0
Pelaksana PPPK	10	2	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0
PNS	28	10	8	22	8	0	7	16	2	13	0	0
PPPK	10	2	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0
<b>Jumlah</b>	50			8	22	8	0	7	24	2	17	0

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah dalam pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik. Komposisi jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih

besar dibandingkan dengan yang bukan, secara signifikan diharapkan mampu memberikan andil yang cukup besar.

Table 1.2 Rekap PNS Kesbangpol Prov. Kaltim berdasarkan Pendidikan dan Gender

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
S.3	0	0	0
S.2	5	2	7
S.1	14	5	19
D.IV	3	1	4
D.III	2	0	2
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	15	3	18
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
<b>Jumlah</b>	39	11	50

Sumber data : Badan Kesbangpol Prov. Kaltim per 31 Desember 2025

#### E. Aspek Strategis Organisasi

Penerapan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*), mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja mampu merumuskan dan menetapkan indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi pemerintah. Acuan indikator kinerja tingkat nasional yang dapat digunakan adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dikeluarkan oleh kementerian/Lembaga, atau Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai PD yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dengan menjaga stabilitas daerah agar terbebas dari ancaman dan gangguan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, serta meningkatkan etika berpolitik, berbudaya,

berdemokrasi, dan jiwa nasionalisme. Aspek Strategis Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik.
2. Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah.
3. Meningkatkan stabilitas sosial ekonomi yang dinamis bagi kelancaran pembangunan serta terbangunnya suatu kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat yang kokoh.
4. Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.

#### F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Table 1.3 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Terganggunya stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kalimantan Timur	Belum optimalnya kesadaran berdemokrasi masyarakat	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan
		Masih lemahnya semangat kebersamaan dan turunnya kepedulian sosial
Merosotnya kecintaan	Kurangnya pemahaman	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	terhadap nilai-nilai seni dan budaya bangsa	nilai-nilai seni dan Budaya di masyarakat
	Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba
	Meningkatnya penganut agama yang menyimpang	Kurangnya edukasi moderasi beragama
	Peningkatan penggunaan produk import atau penurunan penggunaan produk dalam negeri	Kurangnya edukasi cinta produk dalam negeri
	Banyaknya ormas yang tidak sesuai AD/ART	Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus pengurus ormas untuk menjalankan tupoksinya
	Tingginya potensi konflik sosial diwilayah Kalimantan Timur	Ego sektoral kedaerahan menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konflik sosial Geografis Kalimantan Timur yang multikultural

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program kepala daerah dan Wakil kepala daerah, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
2. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
3. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
4. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam

gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

### G. Sarana dan Prasarana Kerja

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap telah menyiapkan sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur serta sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun jumlah sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2025

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	2	3
<b>1,3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>27.802.091.724,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>TANAH</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.01	TANAH	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>PERALATAN dan MESIN</b>	<b>27.637.227.724,00</b>
1.3.2.01	ALAT BESAR	37.500.000,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	10.146.217.984,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL dan ALAT UKUR	26.900.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	5.600.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR dan RUMAH TANGGA	7.959.121.615,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI dan PEMANCAR	2.806.811.268,00
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN dan KESEHATAN	5.325.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	59.213.152,00
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	227.986.550,00
1.3.2.10	KOMPUTER	6.342.971.155,00
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN dan PEMURNIAN	0,00
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	19.581.000,00
1.3.2.16	ALAT PERAGA	0,00
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
<b>1.3.3</b>	<b>GEDUNG dan BANGUNAN</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
1.3.3.02	MONUMEN	0,00
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
<b>1.3.4</b>	<b>JALAN, JARINGAN dan IRIGASI</b>	<b>0,00</b>
1.3.4.01	JALAN dan JEMBATAN	0,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	2	3
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	0,00
1.3.4.03	INSTALASI	0,00
1.3.4.04	JARINGAN	0,00
<b>1.3.5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>164.864.000,00</b>
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	164.864.000,00
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA GA	0,00
1.3.5.03	HEWAN	0,00
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
1.3.5.05	TANAMAN	0,00
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
<b>1.3.6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN</b>	<b>0,00</b>
1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	0,00
<b>5,2</b>	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
<b>1.5.3</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>45.739.530.000,00</b>
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	45.739.530.000,00
<b>1.5.4</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0,00</b>
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00

Sumber Data : Inventaris Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis merupakan gambaran dan arahan kebijakan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan perencanaan strategis sebagai panduan kerja operasional yang visioner sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu kepada Rancangan RPD 2024-2026, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu: **Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi:** yang dimaksud adalah penerapan *core value* ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Berdasarkan tujuan Rancangan RPD 2024-2026 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada sasaran:

**Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK.**

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada tabel, antara lain:

Tabel 2.1  
Perencanaan Strategis Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. th. 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur			Indeks	81,02	81,10	81,15	81,20
		Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,90	77,95	78,00	78,05
		Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	31	100	90	80
Tujuan 2: Mewujudkan	1. Indeks Kepuasan			Indeks	84,41	85,00	85,50	86,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. th. 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Masyarakat Pemerintah Daerah							
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai	78,10	78,50	79,30	80,01
		Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	74,26	75,00	75,50	76,00
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	66,97	68,00	68,50	69,00

Program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Sub Kegiatan/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi Politik masyarakat	Indeks	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Sub Kegiatan/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.</li> <li>b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.</li> <li>c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara</li> <li>d. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila</li> <li>e. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka</li> <li>f. Pelaksanaan tugas Paskibraka</li> <li>g. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</li> <li>h. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</li> <li>i. Pembentukan Paskibraka</li> </ol> </li> </ol>
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.</li> <li>b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.</li> </ol> </li> </ol>
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan</li> </ol> </li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Sub Kegiatan/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p>
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<p>1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p>
2	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</p> <p>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Indeks</p> <p>Nilai</p>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</p> <p>c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi</p>

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Sub Kegiatan/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Anggaran 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang muncul dalam RPJMD 2024-2026, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Perhitungan dilakukan dengan melalui 8 variabel yaitu 1. Kinerja Lembaga Legislatif 2. Kinerja Lembaga Yudikatif 3. Netralitas Penyelenggara Pemilu 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah 5. Jaminan Pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat 6. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah 7. Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik 8. Pendidikan Politik pada kader partai politik. Formulasi perhitungan : Indeks Lembaga Demokrasi = (Indikator 1 x AHP Indikator 1)+ (Indikator 2 x AHP Indikator 2) + (Indeks Indikator 3 x AHP Indikator 3)+ (Indeks Indikator 4 x AHP Indikator 4)+ (Indeks Indikator 5 x AHP Indikator 5)+ (Indeks Indikator 6 x AHP Indikator 6)+ (Indeks Indikator 7 x AHP Indikator 7)+ (Indeks Indikator 8 x AHP Indikator 8)	Bada Pusat Statistik (BPS)	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipeleksosbud	Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Metode pengukuran : survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan teknik pemberian kuisioner, baik pengisian secara online, dengan pengisian sendiri maupun kuisioner dengan wawancara tatap muka. Alat ukur : kuesioner tentang unsur-unsur pelayanan dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas dari setiap unsur pelayanan. Angka 1 mewakili : tidak baik, Angka 2 mewakili : kurang baik, Angka 3 mewakili : baik dan Angka 4 mewakili : sangat baik.  IKM = Total Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi X (Nilai Penimbang)	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Tim Inspektorat	Inspektorat Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

Sumber Data: IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan amanah dan kesepakatan dari atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur akan mampu mewujudkan kesinambungan kinerja dan menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya. Dengan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 seperti dalam tabel 2.4:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah potensi	90
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,50
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Niali	68,50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19,429,812,846	Murni + APBDP
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	7,969,488,092	Murni + APBDP
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	67,368,905,686	Murni + APBDP
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,155,441,565	Murni + APBDP
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	891,273,240	Murni + APBDP
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	5,202,714,515	Murni + APBDP

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2025

#### 1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.97.309.793.444,- dan melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2025 menjadi Rp.102.017.635.944,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.95.890.562.194,- atau sebesar 93,99%.

#### 2. Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.5  
Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	Rp. 12.026.649.094,-	Rp. 9.994.761.893,-	83,11%

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 23.124.889.589,-	Rp. 19.123.626.398,-	82,70%
	Belanja Hibah	Rp. 66.312.246.420,-	Rp. 66.271.413.000,-	99,94%
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 553.850.841,-	Rp. 500.760.903,-	90,41%
	Jumlah	Rp. 102.017.635.944,-	Rp. 95.890.562.194,-	93,99%

### 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Belanja operasi per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Rp. 67.368.905.686,-	Rp. 67.213.392.365,-	99,77%
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Rp. 15.218.917.412,-	Rp. 12.014.886.699,-	78,95%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Rp. 19.429.812.846,-	Rp. 16.662.283.130,-	85,76%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

##### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Nomor : 700.1.2.1/1768/ltprov-II tanggal 21 Mei 2025 dengan hasil Evaluasi sebesar **72,95** atau predikat **“BB” (Sangat Baik)**, sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini:

Tabel 3.1  
Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2023	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Kinerja	30	20,70	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	20	14,80	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	10	7,70	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	11,80	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	16,45
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20	15,20	Capaian Akuntabilitas Kinerja	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,20	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,95
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB (Sangat Baik)</b>	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB (Sangat Baik)</b>

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun 2025

##### 2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi

Sesuai hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu:

Tabel 3.2  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	<p><b>Perencanaan Kinerja:</b></p> <p>1. Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) supaya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktifitas antar bidang dengan tugas/fungsi yang berkaitan.</p> <p>2. Melakukan reviu atas perumusan dan penetapan rencana aksi dalam perencanaan kinerja setiap level pegawai;</p>	Membuat pola crosscutting eksternal dan internal	<p>1. Melakukan rapat koordinasi lintas bidang dalam tahap penyusunan rencana kinerja tahunan.</p> <p>2. Melakukan reviu bersama terhadap indikator dan target kinerja bidang</p>
2.	<p><b>Pengukuran Kinerja:</b></p> <p>a. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment kepada bidang maupun setiap pegawai.</p> <p>b. Melengkapi hasil monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi permasalahan sebelumnya sebagai langkah nyata adanya perbaikan secara berkala dan setiap level dan meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan melengkapi data kinerja secara andal untuk mendukung capaian kerjanya untuk setiap pegawai.</p> <p>c. Melengkapi hasil monitoring dan evaluasi kinerja dengan realisasi</p>	<p>1. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai didasari oleh hasil kinerja.</p> <p>2. Menyajikan efisiensi atas penggunaan anggaran Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya.</p> <p>3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi E-SAKIP.</p>	<p>a. Menyusun kebijakan internal mengadopsi Pergub Budaya Kerja No 30 th 2024 (yang memuat diantaranya kriteria atas pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment).</p> <p>b. Membuat Laporan hasil monev implementasi renaksi secara berkala dilengkapi dengan uraian factor pendorong, permasalahan dan rekomendasi, tindak lanjut secara berkala per triwulan.</p> <p>c. Membuat nota dinas pendampingan internal untuk memastikan tertib dalam kelengkapan isian E-SAKIP dari level JPT sampau ke pelaksana.</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut
1	2	3	4
	<p>anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan kinerja untuk memastikan tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.</p>		
3.	<p><b>Pelaporan Kinerja:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar Laporan kinerja menyesuaikan aktivitas dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.</li> <li>2. Melakukan perbaikan pada Laporan LKJIP dengan menyajikan permasalahan, rekomendasi perbaikan dan tindaklanjut.</li> <li>3. Melakukan perbaikan pada Laporan LKJIP dengan menyajikan informasi bahwa Laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Laporan kinerja yang disusun secara berkala.</li> <li>2. Menyajikan efisiensi atas penggunaan anggaran Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya.</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi E-SAKIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reuiu LKJIP pertriwulan</li> <li>2. Menyajikan informasidalam Laporan kinerja (LKJIP) yang telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas.</li> <li>3. LKJIP dimanfaatkan digunakan untuk strategi perbaikan perencanaan selanjutnya.</li> <li>4. Dijadikan bahan evaluasi terhadap budaya kerja.</li> </ol>
4.	<p><b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan evaluasi kinerja atas capaian sasaran kinerja/program yang telah diperjanjikan (PK) secara berkala/periode untuk menilai keberhasilan capaian sasaran kinerja /program/kegiatan dan dilengkapi laporan evaluasi yang menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan kinerja agar dapat mendorong perbaikan dan peningkatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Laporan evaluasi kinerja yang disusun secara berkala yang memuat permasalahan, rekomendasi perbaikan dan tindaklanjut.</li> <li>2. Melakukan perbaikan pada Laporan evaluasi rencana aksi dengan menyajikan analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Laporan hasil monev implementasi renaksi secara berkala dilengkapi dengan uraian factor pendorong, permasalahan dan rekomendasi, tindaklanjut secara berkala (pertriwulan/perbulan dalam bentuk matrik memastikan tertib dalam kelengkapan isian E_SAKIP dari level JPT sampai ke pelaksanaan.</li> <li>2. Menindaklanjuti semua rekomendasi</li> </ol>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut
1	2	3	4
	kinerja. 2. Melakukan analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda. 3. Mengoptimalkan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sakiip agar dapat meningkatkan implementasi SAKIP.	suatu rencana atau agenda. 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja LHE SAKIP Tahun 2024.	SAKIP Inspektorat yang dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan.
5.	<b>Capaian Kinerja:</b> Capaian kinerja harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan dilengkapi dengan informasi kinerja yang dapat diandalkan (mudah ditelusuri dengan data berkala).	Berkaitan hal ini, kami dalam rangka meningkatkan capaian kinerja baik output dan outcome, dengan melaksanakan evaluasi secara priodik dan melakukan monev per triwulan agar pencapaian sasaran, dan Kinerja organisasi tercapai optimal.	Melaksanakan monitoring evaluasi secara priodik, yakni bulanan, triwulan dan semester, dan dituangkan dalam Laporan monitoring evaluasi.

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Pengukuran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 114,11% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4  
Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim  
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%	Kriteria/ Kode
1	2	3	4	5	8	9	
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78	85,68	109,85%	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%	Kriteria/ Kode
1	2	3	4	5	8	9	
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah potensi	90	69	123,33%	Sangat Baik
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,50	88,17	116,77%	Sangat Baik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,50	72,95	106,50%	Sangat Baik

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur per Triwulan Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5  
Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim  
Per Triwulan Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78	Triwulan I	0	0	100%
					Triwulan II	0	0	100%
					Triwulan III	78	85,68	109,85%
					Triwulan IV	0	0	100%
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah potensi	90	Triwulan I	25	12	152%
					Triwulan II	25	21	116%
					Triwulan III	25	22	112%
					Triwulan IV	15	14	106,67%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,50	Triwulan I	0	0	100%
					Triwulan II	37,75	42,87	113,56%
					Triwulan III	0	0	100%
					Triwulan IV	37,75	45,30	120%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,50	Triwulan I	0	0	100%
					Triwulan II	0	0	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Triwulan III	68,50	72,95	106,50%
					Triwulan IV	0	0	100%

Sumber Data : hasil moneyv IKU per triwulan

### C. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025, yaitu terdapat 3 (tiga) sasaran, dengan 4 (empat) indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap tiga sasaran dan empat indikator telah dicapai rata-rata sebesar 114,11% dengan kategori **Sangat Baik**. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:

#### Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Capaian skor aspek Lembaga demokrasi

Sumber data indikator diperoleh dari hasil perhitungan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) wilayah yang dirilis oleh BPS RI. Pengukuran Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi merupakan salah satu aspek dalam perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian penting dari upaya mengukur dan mengevaluasi tingkat perkembangan dan penerapan demokrasi sebagai pijakan dalam proses konsolidasi kinerja demokrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan parameter tersebut, diharapkan dapat diperoleh komparasi/kesesuaian antara progres konsolidasi demokrasi dengan jalur demokrasi yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator), proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan dan kesetaraan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik dan lembaga independen seperti penyelenggara pemilu di pusat dan daerah.

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Adapun metode pengumpulan data IDI menggunakan metode triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Media pengumpulan data pun dapat diperoleh melalui tiga instrumen, yakni:

a. Reviu dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita Online)

Reviu Media merupakan metode pengumpulan data secara kuantitatif. Surat kabar cetak dan portal berita online dipilih karena media tersebut merupakan sumber informasi yang dapat menangkap berbagai fenomena demokrasi di masyarakat. Sumber ini memiliki keunggulan karena keteraturan penerbitan, sehingga bisa menggambarkan fenomena tersebut dalam satu tahun penuh.

b. Reviu dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I

Reviu Media merupakan metode pengumpulan data secara kuantitatif. Dokumen dan data resmi K/L/D/I merupakan data sekunder yang relevan dengan indikator tertentu yang diukur. Sumber ini dipilih karena memiliki validitas tinggi karena merupakan data resmi, serta mampu memberikan gambaran makro/menyeluruh terhadap sebuah fenomena dalam satu tahun pengukuran.

c. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan tahapan pengumpulan data kualitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan validasi silang data kuantitatif yang sudah dikumpulkan. Tujuan FGD IDI:

- Mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui reviu media dan dokumen.
- Eksplorasi dan menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui reviu media dan reviu dokumen.

Pengukuran Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi dilakukan dengan menggunakan 8 Indikator yang terkait dengan bidang politik. Adapun indikator penilaian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.7  
Sumber Data Penilaian IDI  
pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

No.	Indikator	Sumber Data			
		Surat Kabar	Portal Berita Online	Dokumen/Data K/L/D/I	FGD
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja Lembaga Legislatif			√	
2	Kinerja Lembaga Yudikatif			√	
3	Netralitas Penyelenggara Pemilu			√	
4	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah			√	
5	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat			√	
6	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah			√	
7	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik			√	
8	Pendidikan Politik pada kader partai politik	√	√	√	√

Dari 8 (delapan) indikator diatas, sebanyak 1 (satu) indikator yang dapat menunjang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, antara lain: Indikator Pendidikan Politik pada kader partai politik merupakan acuan dari Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Dalam upaya pencapaiannya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dearah. Sub kegiatan :
  1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Hasil penilaian skor Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan salah satu aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang dirilis oleh BPS RI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Hasil penilaian skor Aspek Indeks Kapasitas Lembaga Dekomrasi  
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024

No	Indikator	Capaian 2024
1	2	3
1	Kinerja Lembaga Legislatif	90,00
2	Kinerja Lembaga Yudikatif	88,57
3	Netralitas Penyelenggara Pemilu	68,18
4	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	95,45
5	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	76,63
6	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00
7	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	75,00
8	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100,00

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya partisipasi politik masyarakat, sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.9  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78	85,68	109,85%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur persentase capaian kinerja sebesar 109,85%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

### 2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Badan Kesbangpol Prov. Kaltim pada periode ini telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2024-2026 dalam menghadapi tantangan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2024-2026. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 terhadap IKU dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	83,00	85,68	2,68%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi periode kedua IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 pada tahun 2025 dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan sebesar 2,68% dari tahun sebelumnya.

### 3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2025 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78,05	85,68	109,78%

Pada tabel 3.11 dapat dilihat bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada indikator kinerja Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi, realisasi mencapai 85,68 dengan tingkat kemajuan 109,78%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan realisasi standar Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/Standar Nasional Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	85,68	82,12	3,56%

Pada tabel 3.12 dapat dilihat bahwa terdapat kemajuan yang sangat signifikan pada indikator kinerja Kapasitas Lembaga Demokrasi, perbandingan realisasi capaian secara nasional dengan tingkat kelebihan 3,56%.

Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan

dan kesetaraan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik dan lembaga independen seperti penyelenggara pemilu di daerah. Meskipun demikian, masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai kategori Sangat Tinggi.

## **5. Faktor Pendukung dan Penghambat;**

### **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

Dalam upaya mencapai sasaran strategis pertama : meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penyelenggaraan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya, terdapat beberapa faktor kunci yang dapat mendukung yaitu:

1. Terjalannya kolaborasi dan sinergi lintas sektor di berbagai lini, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, Ormas/LSM, organisasi politik, media, serta masyarakat dalam upaya mewujudkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana yang efektif untuk mengampanyekan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil yang bertanggung jawab melalui kemudahan akses dan penyebaran informasi.
3. Keberadaan Tim Pokja IDI Provinsi Kalimantan Timur yang berperan dalam mengoptimalkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kalimantan Timur melalui pelaksanaan FGD, rapat kerja, serta forum koordinasi lainnya.
4. Memperkuat kemandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebesar Rp.5000,- (lima

ribu) per suara sah. Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBD yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2025 kepada Parpol sejumlah Rp7.214.602.500,-. Pencairan bantuan keuangan Parpol tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.26/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 3.13 Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai Per Suara (Rp)	Peresmian Anggota DPRD Lama (8 bulan di th 2024)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5		6
1	Partai PKB	6	159.394	5.000	02 September 2019	597.727.500
2	Partai Gerindra	10	342.752	5.000	02 September 2019	1.285.320.000
3	Partai PDIP-P	9	322.075	5.000	02 September 2019	1.207.781.250
4	Partai Golkar	15	512.600	5.000	02 September 2019	1.922.475.000
5	Partai Nasdem	3	125.380	5.000	02 September 2019	470.175.000
6	Partai PKS	4	151.666	5.000	02 September 2019	568.747.500
7	Partai PPP	2	84.686	5.000	02 September 2019	317.572.500
8	Partai PAN	4	117.107	5.000	02 September 2019	437.151.250
9	Partai Demokrat	2	108.234	5.000	02 September 2019	405.877.500
Jumlah		55	1.923.894			7.214.602.500

## 2. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun anggaran 2025 juga memberikan bantuan keuangan dalam bentuk belanja hibah uang kepada instansi vertikal (pemerintah pusat) dalam rangka mendukung tereselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Rincian anggaran adalah sbb:

Tabel 3.14 Rincian Bantuan Keuangan Intansi Vertikal (Pemerintah Pusat) tahun 2025

No	Penerima Hibah	Besar Bantuan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kodam VI/Mulawarman	8.578.000.000	
2	Kepolisian Resor Kota Samarinda	1.500.000.000	
3	Pangkalan TNI AL Balikpapan	8.442.500.000	
4	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur	24.000.000.000	
5	Pangkalan TNI AU Dhomber Balikpapan	10.000.000.000	
6	UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan	2.231.218.000	
7	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur	1.700.000.000	
	Jumlah	56.451.718.000	

#### **Faktor Penghambat keberhasilan Kinerja:**

Selain faktor kunci pendukung keberhasilan, Badan Kesbangpol juga menghadapi beberapa kendala dan hambatan dalam proses pencapaian kinerja sasaran, yaitu :

1. Dinamika kebijakan serta isu strategis di tingkat nasional turut berpengaruh terhadap stabilitas dan kondusivitas wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
2. Capaian skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator kinerja Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,32%	1,53%	115,91%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.725 orang	2.580 orang	149,57%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	4 laporan	4 laporan	100,00%

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

Capaian kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Tahun 2025 mencapai sebesar 115,91%. Capaian persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik sebanyak 5 kali, kegiatan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebanyak 1 kali, kegiatan Rapat Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia sebanyak 3 kali, kegiatan Penguatan Lembaga Demokrasi sebanyak 1 kali, kegiatan Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) sebanyak 3 kali, kegiatan coffe morning dengan partai politik sebanyak 2 kali.

Gambar 3.1 Kegiatan Sosialiasi Pendidikan Politik



Gambar 3.2 Kegiatan FGD IDI



Gambar 3.3 Kegiatan FGD Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D)



## 7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.16  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	109,85%	99,77%	10,08%

Dengan tingkat serapan anggaran sebesar 99,77%, pelaksanaan Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik menunjukkan pengelolaan yang optimal. Capaian Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 85,68 atau 109,85% dari target yang ditetapkan mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya relatif efektif dalam mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat.

#### **8. Rencana Tindak Lanjut/Perbaikan**

Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik beserta jajaran, Badan Kesbangpol Kab/Kota, Pokja Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya upaya dalam Pencapaian dan Tindak Lanjut Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Kalimantan Timur ke depan, antara lain:

1. Pemberian hibah bantuan keuangan partai politik dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan partai politik.
2. Pengembangan literasi politik bagi masyarakat dan pengurus lembaga demokrasi serta penerapan best practice dialog politik dan pendidikan politik.
3. Kaderisasi partai perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik yang direncanakan dengan baik, integrasi antara aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik.
4. Pemanfaatan sistem informasi dengan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan situasi politik dalam negeri berbasis digital.
5. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mewujudkan pemenuhan aspek kebebasan, baik dengan perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, maupun unsur masyarakat lainnya.

## Sasaran 2 : Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Konflik, meta indikator sebagai berikut:

Tabel 3.17  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Potensi Konflik	Capaian Jumlah Potensi Konflik Rumus Capaian : $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat, sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.18  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Potensi Konflik	Jumlah	90	69	123,33%

Berdasarkan data diatas, Indikator Jumlah Potensi Konflik bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah potensi konflik mencapai sebesar 123,33%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Capaian sangat baik tersebut menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang berlatar belakang isu ideologi, politik, sosial dan budaya di Provinsi Kalimantan Timur tidak banyak menimbulkan potensi konflik yang akan berdampak terhadap gangguan keamanan. Dengan rendahnya potensi konflik dapat dinyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan kondusif pada tahun 2025.

Berikut daftar data jumlah Potensi Konflik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 3.19 Daftar Data Potensi Konflik Tahun 2025

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kota Bontang	Aliran jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di Kota Bontang berjumlah 50 orang jamaah, berencana mendaftarkan ke Kesbangpol.	Ideologi	Aliran Ahmadiyah pada tahun 2005 berdasarkan fatwa MUI adalah aliran sesat dan menyesatkan.
2	Kota Balikpapan	Ormas Gepak Kuning, LPADKT-KU dan Baladika Mulawarman melakukan aksi unjuk rasa damai dan melakukan aksi sweeping terhadap atribut ormas GRIB JAYA dan melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan	Sosbud	Penolakan masih terus dilakukan.
3	Kabupaten Berau	RDP antara DPRD Berau dengan PT. Berau Coal terkait pemutusan hubungan kerja massal.	Sosbud	Penanganan selesai
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	PT. TSB, PT. SUAN, PT.MDP dengan pengurus persatuan petani kelapa sawit muara badak (PPKS) mengeluhkan akrena PT. SUAN tidak beroperasi dan tutup total sehingga masyarakat sebagai mitra kesulitan dalam menjual hasil panen sawit, meminta agar PT SUAN beroperasi Kembali.	Sosbud	Pengurus petani sudah bersurat ke DPRD Kukar agar difasilitasi pertemuan dengan PT. SUAN
5	Kota Samarinda	Unjuk rasa Gabungan supporter Borneo FC menuntu agar GOR Segiri digunakan pada liga 1 BRI 2025 dan mengancam akan melakukukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim jika tuntutan tidak dipenuhi	Sosbud	Penanganan selesai
6	Kota Samarinda	Aliansi mahasiswa Kaltim menggugat dan menolak RUU Minerba, menolak izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi.	Sosbud	Penanganan selesai
7	Kota Samarinda	Penolakan warga Masyarakat kelurahan Sungai kledeng terhadap rencana Pembangunan gereja toraja bukit harapan loa janan cabang kebaktian Sungai keledang.	Ideologi	Penanganan selesai
8	Kota Bontang	Masyarakat menuntut PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga-Sanga) agar memberikan tali asih kepada	Sosial	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		299 anggota persatuan bididaya kerrang dara yang terdampak atas dugaan limbah hasil pengeboran RIG GWDC 16 yang berada di proyek PHSS.		
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Aliansi peduli nelayan kerrang dara (APNKD) menuntut PT. PHSS melakukan Ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak atas pencemaran limbah yang membuat karang dara mati secara massal.	Sosial	Penanganan selesai
10	Kota Samarinda	Aliansi Masyarakat Pelabuhan maritim/tenaga kerja bongkar muat samarinda menuntut penutupan alur Sungai Mahakam.	Sosial	Penanganan selesai
11	Kabupaten Kutai Timur	Kelompok tani gunung jepu-jepu menuntut agar PT. Kobexindo Coment membayar Ganti rugi lahan kelompok tani jepu-jepu Bersatu.	Sosial	Penanganan selesai
12	Kabupaten Paser	Aliansi honorer menolak kebijakan pemunduran penerbitan SK PNS dan PPPK	Sosial	Penanganan selesai
13	Kota Bontang	Ormas DAKUBA Kaltim menuntut PT. GAM agar tidak melakukan aktivitas di lahan sengketa terkait gugatan kepemilikan lahan saat ini telah dijadikan jalur hauling oleh PT. GAM.	Sosbud	Penolakan masih terus dilakukan.
14	Kota Samarinda	Permasalahan pengoplosan pertalite dan pertamax yang merugikan Masyarakat	Sosbud	Penolakan masih terus dilakukan.
15	Kabupaten Kutai Timur	Keberadaan jamaah tablik dari negara Pakistan dalam rangka melaksanakan syiar agama islam di kab kutai timur	Ideologi	Penanganan selesai
16	Kabupaten Paser	Keputusan pemangku adat paser tentang pengambilalihan seluruh kepengurusan Lembaga adat paser mulai dari Tingkat DPP, DPD dan DPW di wilayah Kab Paser, Kota Balikpapan, dan Kab PPU.	Sosbud	Penanganan selesai
17	Kabupaten Kutai Timur	Banyaknya laporan dari Masyarakat termasuk penyebab sering terjadi	Sosbud	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		banjir di Sangatta Utara dan Selatan terkait dampak dari penambangan PT APE.		
18	Kota Samarinda	Koalisi Masyarakat sipil Kaltim menuntut tidak adanya tindak lanjut penanganan permasalahan dari pemerintah dan pihak kepolisian mengenai peristiwa pembunuhan Masyarakat adat dan permasalahan tambang di muara kate kaltim.	Sosbud	Penanganan selesai
19	Kabupaten Paser	Rencana ritual adat oleh ormas awak kain naket bolum dalam Upaya penguasaan lahan HGU milik PTPN IV.	Ideologi	Penanganan selesai
20	Kota Samarinda	Permasalahan perizinan pendirian rumah ibadah Gereja Toraja Bukit Harapan Loa Janan Cabang Kebaktian Sungai Keledang	Agama	Difasilitasi dengan rapat FKUB Kota Samarinda
21	Kabupaten Kutai Timur	Mediasi menindaklanjuti Rencana Aksi Unras EKs Karyawan PT. Anugrah Energitama yang tergabung dalam FSP KEP SPDI Kutai Timur	Sosial	Difasilitasi dengan FKDM Kutai Timur atar Karyawan (tergabung dalam FSP KEP SPDI) dan PT. Anugrah Energitama
22	Kabupaten Paser	Ormas Awak Kain Naket Bolum upaya penguasaan lahan HGU milik PT. PN IV	Sosial	Dalam proses pengendalian
23	Kabupaten Kutai Timur	Sengketa antara Koperasi Desa Se-Kecamatan Rantau Pulung dan PT. NIKP Gewa Plantation.		Perkembangan belum dilaporkan
24	Kota Samarinda	Relokasi pedagang pasar subuh jalan yos Sudarso samrinda ke pasar beluluq lingau (pasar Dayak) jl. Pm. Noor sempaja Selatan, samarinda.	Sosial	Penanganan selesai
25	Kota Bontang	Unjuk rasa aliansi gabungan nelayan marangkayu.	Sosial	Penanganan selesai
26	Kabupaten Berau	Unjuk rasa oleh serikat buruh pengurus pusat Berau Bersatu (PP PBBB-KASBI) ke Kantor DPRD Kab. Berau menuntut penolakan closing project yang dilakukan PT. LMM dan meminta Bupati Berau bertanggung jawab atas Nasib korban PHK.	Sosial	Penanganan selesai
27	Kabupaten Kutai Timur	Aksi penghentian kegiatan tambang PT. TMR dengan cara berdiri di tengah jalan dan memasang septi line di	Sosial	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		jalan houling daerah blok A oleh massa eks karyawan PT. Tawabu Mineral Resource (TMR).		
28	Kota Samarinda	Aksi unras aliansi mitra kaltim Bersatu (AMKB) dengan tuntutan meminta keniakan tarif dan lainnya	Sosial	Penanganan selesai
29	Kabupaten Berau	Aksi unras aliansi serikat buruh menuntut penerapan perda no 8/2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal di Kab. Berau	Sosial	Penanganan selesai
30	Kabupaten Kutai Timur	Adanya indikasi ajaran menyimpang yehova di sekolah wilayah kecamatan kongbeng	Ideologi	Penanganan selesai
31	Kota Samarinda	Aksi unras cipayung plus kaltim,, menuntut pencabutan izin Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi pasca tambang, mengevaluasi pertamina, menyelesaikan konflik agrarian secara adil dan transparan.	Sosial	Penanganan selesai
32	Kabupaten Kutai Timur	Penolakan Pembangunan tempat hiburan malam oleh warga RT 14 Desa Sepaso	Sosial	Penanganan selesai
33	Kota Samarinda	Unras maritim muda daerah kaltim (MMD-KT), menuntut PT. Pelindo IV Samarinda untuk segera mengevaluasi SOP serta SDM dalam pemanduan dan penundaan pengolongan jembatan, dan menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan aktivitas pemanduan dan penundaan kapal yang melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga di seluruh jembatan strategis di kaltim.	Sosial	Penanganan selesai
34	Kota Samarinda	Aksi unras oleh aliansi Mahakam, menuntut agar segera merealisasikan 8 program gubernur dan wakil gubernur, hentikan pertambangan ilegal di kaltim, menagih CSR pertambangan yang ada di Kaltim, segera memperbaiki tata Kelola lingkungan hidup di Kaltim dan menuntut mengakui dan memenuhi hak-hak Masyarakat adat di	Sosial	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		Kaltim.		
35	Kota Samarinda	Aksi unras oleh PMII Samarinda, menuntut kejadi agar melakukan audit investasi atas dugaan korupsi tol balsam dari hasil temuan BPK.	Sosial	Penanganan selesai
36	Kota Samarinda	Aksi unras oleh serikat pemuda anti korupsi (SPASI) Kaltim, menuntut kepada aparat penegak hukum (APH) kejadi atas markup speksifikasi proyek Pembangunan Gedung madrasah darusalam samarinda.	Sosial	Penanganan selesai
37	Kabupaten Paser	Aksi unras supir truk roda 6 di kecamatan batu kajang menuntut agar diberikan izin Kembali melakukan angkutan batu bara menggunakan jalan umum dari PT. Mantimin Coal Mining di Kalsel ke Kab Paser.	Sosial	Penanganan selesai
38	Kabupaten Kutai Timur	Sengketa lahan antara kelompok tani nila Lestari dengan PT. EMAS di kecamatan telen.	Sosial	Penanganan selesai
39	Kabupaten Berau	Safari dakwah Bersama Syekh Sief Addeen Yusuf Al Shodiq dari Palestina	Sosbud	Penanganan selesai
40	Kota Bontang	Sidak tenaga kerja asing di wilayah Kel. Tanjung Laut, terdapat 16 TKA yang belum melapor.	Ideologi	Penanganan selesai
41	Kabupaten Paser	Pengawasan orang asing (PORA) Imigrasi Balikpapan terkait keberadaan orang asing di Kabupaten Paser	Sosial	Penanganan selesai
42	Kota Samarinda	Ppengawasan aliran keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kota Samarinda, aliran khilafatul Muslimin, Yayasan Salam Palestina dan Hari rayan Imlek.	Sosial	Penanganan selesai
43	Kabupaten Berau	Kelangkaan galian C pasir dan koral di Kabupaten Berau	Sosial	Penanganan selesai
44	Kabupaten Kutai Timur	Permasalahan ketenagakerjaan antara Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongles Aliansi Serikat Buruh Indonesia (PP FPBM-KASBI) dengan PT. Gunta Samba Estate	Sosial	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		Ampanas, PT. Nusantara Agro Sawit, PT. Kalimantan Agro Nusantara, PT. telen Estate Mata Air, PT. NIKP/Gawi, PT. Dinamika Prima Arta dan PT.MKC.		
45	Kota Bontang	Konflik sengketa lahan pembuatan bendungan Sungai di perbatasan Kelurahan Telihan dan Kelurahan Kanaan	Sosial	Penanganan selesai
46	Kabupaten Kutai Timur	Aksi Unras oleh persatuan Truck Material Sangatta (PERMATA) Kutai timur terkait dengan permasalahan pembagian kuota BBM jenis solar bersubsidi di SPBU wilayah Sangatta	Sosial	Penanganan selesai
47	Kota Samarinda	Aksi unras oleh pengurus koordinator cabang penggerak mahasiswa islam Indonesia (PKC PMII), mendesak Gubernur Kaltim untuk membuka piutang PT. KPC sebesar 280 M.	Sosial	Penanganan selesai
48	Kabupaten Paser	Surat pernyataan DWP Lembaga Adat Paser (LAP) dan DWP Lembaga Adat Borneo (LAPB) Kecamatan Batu Sopang tentang kesepakatan meminta sdr Bambang Siswiyono untuk meninggalkan Kecamatan Batu Sopang.	Sosial	Penanganan selesai
49	Kota Bontang	Tuntutan driver ojek online terhadap kebijakan mie gacoan	Sosial	Penanganan selesai
50	Kota Samarinda	Aksi unras oleh aliansi ormas dari Dewan Adat Dayak dan Pasukan Merah di Kantpr Gakkumdu untuk mencari keberadaan putra adat	Sosial	Penanganan selesai
51	Kabupaten Kutai Timur	Aksi unjuk rasa PROPAMEL Cakra Bumi Nusantara (Kelompok tani mamminasae, kelompok tani karya tani dan karya insani) terkait tindaklanjut penyelesaian untuk penganggaran pembebasan lahan kelompok tani.	Sosial	Penanganan selesai
52	Kabupaten Penajam Paser Utara	Unjuk rasa aliansi Gerakan rakyat penajam (GERAM) di Kantor DPRD dan Polres Kab. PPU, menuntut satndar yang layak bagi guru,	Sosial	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		meningkatkan fasilitas Pendidikan, transparansi APBD PPU, standar UMR dan fasilitas BPJS		
53	Kabupaten Kutai Timur	Kegiatan aksi penutupan/pemortalan akses jalan menuju PT. KIN Desa Muara Bengalon Kec. Bengalon.	Sosial	Penanganan selesai
54	Kabupaten Kutai Timur	Aksi unjuk rasa terkait adanya PHK karyawan PT. THIESS site Sangatta	Sosial	Penanganan selesai
55	Kabupaten Kutai Timur	Aksi unjuk rasa oleh Koalisi Demokrasi Rakyat (KDR) Kutai Timur terkait pentingnya kesadaran Sejarah, solidaritas dan partisipasi menjaga demokrasi dan HAM.	Sosial	Penanganan selesai
56	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa oleh Gerakan Aktivitas Mahasiswa Kalimantan Timur (GAM KT) terkait desakan untuk Kajati agar pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proyek ini baik dari pihak CV KPB Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekda Kukar	Sosbud	Penanganan selesai
57	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur di depan kantor BPD Kaltimara terkait kasus kredit fiktif Bank Kaltimara tahun 2018 sebanyak 47 kredit	Sosbud	Penanganan selesai
58	Kabupaten Paser	Pembakaran 1 unit mobil pickup milik pencuri sawit oleh warga di Desa Kerang Kec batu Engau	Sosbud	Penanganan selesai
59	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa peduli lingkungan Kaltim (AMPL-KT), mendesak Kadis Disdikbud Kaltim untuk melakukan klarifikasi dan transparansi terkait 6 paket pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi	Sosbud	Penanganan selesai
60	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur (APPK-KT) di depan Kantor DPRD Provinsi Kaltim, mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Prov Kaltim untuk	Sosbud	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		segera memanggil dan memeriksa oknum anggota dewan yang diduga telah melanggar etika dan menyinggung isu sara dalam berbicara di media sosial		
61	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Peduli Kalimantan Timur (GM-PEKAT) terkait tuntutan agar Kejaksaan Negeri Samarinda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses hukum Paiman Bin Pairi dan segera membebaskan atau menghentikan proses hukum terhadapnya jika terbukti	Sosbud	Penanganan selesai
62	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa oleh Masyarakat sekitar terhadap proyek terowongan jalan kakap yang menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan karena guncangan alat berat	Sosbud	Penanganan selesai
63	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa oleh laskar pemuda adat Dayak Kalimantan (LPADKT) cabang Kota Samarinda terkait penolakan pemangkasan DBH (dana bagi hasil)	Sosbud	Penanganan selesai
64	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa oleh pergerakan mahasiswa islam Indonesia cabang samarinda (PMII Kota Samarinda) di depan Kantor Balai Gakkum LHK Kalimantan	Sosbud	Penanganan selesai
65	Kota Samarinda	Penerbitan lahan/asset yang berada di jalan Kawasan kelurahan Baqa Kec Samarinda Seberang yang berada dibelakang kantor PDAM jalan sultan hasanuddin	Sosbud	Penanganan selesai
66	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa oleh pengurus cabang pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PC PMII) Kota Samarinda di depan pengadilan negeri samarinda terkait dengan kasus pak Paiman dengan denda 500 jta diganti hukuman 1 bulan penjara	Sosbud	Penanganan selesai
67	Kota Samarinda	Seruan aksi rakyat kaltim Bersatu menolak kebijakan	Sosbud	Penanganan selesai

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
		pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat		
68	Kabupaten Berau	Aksi unjuk rasa oleh aliansi serikat pekerja/ serikat buruh Kab Berau terkait perundingan UMK	Sosbud	Penanganan selesai
69	Kota Samarinda	Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh koalisi Masyarakat sipil Kalimantan Timur terkait mempertanyakan perkembangan pelaporan warga atas dugaan tidak dilakukannya reklamasi oleh PT. Kencana wisma di Kab Kutai Barat	Sosbud	Penanganan selesai

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Badan Kesbangpol Prov. Kaltim pada periode ini telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2024-2026 dalam menghadapi tantangan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2024-2026. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 terhadap IKU dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20  
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah	19	69	50%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi periode kedua IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 pada tahun 2025 dengan indikator kinerja Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud mengalami peningkatan sebesar 50% dari tahun sebelumnya.

### 3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2025 dengan Rencana Startegis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah Potensi	80	69	113,75%

Pada tabel 3.21 dapat dilihat bahwa perbandingan yang signifikan pada indikator kinerja Jumlah potensi konflik ipoleksosbud, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 69 dengan tingkat kemajuan 113,75%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun anggaran 2025 tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat oleh karena itu tidak terdapat indentifikasi (nihil).

### 5. Faktor Pendukung dan Penghambat

#### **Faktor Pendukung keberhasilan Kinerja:**

- a. Adanya pola komunikasi dan koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan forum-forum kemitraan FORKOPIMDA, FKUB, FPK, FKDM dan FKPT.
- b. Diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 100.3.3.1/K.35/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2025-2028.
- c. Diterbitkannya keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 100.3.3.1/K.34/2025 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini pada bldang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Pertahanan Keamanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- d. Diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 100.3.3.1/K.46/2025 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- e. Diterbitkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan serta Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Adanya sinergi yang terbangun antara Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Kesbangpol kabupaten/kota, BNNP Provinsi Kalimantan Timur, serta pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat terlaksana berbagai kegiatan pencegahan penanganan penyalahgunaan narkoba yang saat ini masih menjadi salah satu prioritas Pemda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam prosesnya, pada Tahun 2023 dibentuk Pengankatan Relawan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan wujud komitmen dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Adanya berbagai forum komunikasi yang bergerak dalam hal harmonisasi dan toleransi serta memperkuat moderasi beragama di Provinsi Kalimantan Timur, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkup akademisi yang diharapkan dapat meningkatkan rasa toleransi antar masyarakat serta memelihara kerukunan antar umat beragama dengan lebih intensif di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

**Faktor Penghambat keberhasilan Kinerja:**

Selain faktor kunci pendukung keberhasilan, Badan Kesbangpol juga menghadapi beberapa kendala dan hambatan dalam proses pencapaian kinerja sasaran, antara lain:

- a. Tingginya tingkat kemajemukan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berpotensi menimbulkan kerawanan konflik sosial dan budaya, serta membuka peluang berkembangnya paham-paham negatif seperti radikalisme, ekstremisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.
- b. Masih adanya ancaman berupa penyebaran paham-paham yang berusaha mengubah paradigma masyarakat Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak turut serta melestarikan nilai luhur beretika dan budaya asli bangsa.
- b. Adanya perubahan dan perkembangan teknologi yang telah memudahkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berujung pada dekadensi moral atau pengikisan jati diri bangsa. Hal ini harus menjadi perhatian bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan PPWK, khususnya yang mengarah pada pendidikan karakter demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
- c. Adanya dinamika perubahan kebijakan nasional yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain, masih ditemui beberapa permasalahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, utamanya yang berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah, serta isu ketimpangan ekonomi yang sampai saat ini masih menimbulkan berbagai gesekan/potensi konflik di masyarakat.
- d. Pendidikan moral dan pembangunan karakter merupakan proses panjang yang bertahap dan kontinyu sehingga memerlukan kerja sama yang lebih luas dan mendalam dari seluruh unsur dan lapisan masyarakat.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator kinerja Jumlah potensi konflik ipoleksosbud didukung oleh keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.22  
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap  
Sasaran 2 : Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	83,33%	83,33%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 dokumen	5 dokumen	83,33%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2947 orang	7607 orang	304,65%
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	4 laporan	100,00%
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	300 orang	300 orang	100%
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 laporan	4 laporan	100%
		Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	11 laporan	11 laporan	100%
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 laporan	3 laporan	100%
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40	40	100%
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	33,58%	33,70%	100,36%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1725 orang	2580 orang	149,57%
		Pelaksanaan Monitoring	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	4 laporan	4 laporan	100%

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	100%	100%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1270 orang	818 orang	64,41%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
4	Program		Persentase potensi	100%	100%	100%

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		konflik sosial yang ditangani			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 dokumen	8 dokumen	100%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1380 orang	1412 orang	102,32%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi"	12	12	100%

## 1. Capaian Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2025 didasarkan atas capaian indikator kinerja persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Persentase ketercapaian indikator kinerja ini adalah sebesar 83,33%. Program ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi FPK sebanyak 3 kali, kegiatan sosialisasi, pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan, pemuka masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan dan bagi mahasiswa sebanyak 4 kali, kegiatan pembentukan karakter bagi usia dini sebanyak 1 kali, kegiatan sosialisasi paskibraka dan pembentukan paskibraka sebanyak 12 kali, dan kegiatan perayaan hari-hari besar nasional sebanyak 2 kali.

Gambar 3.4  
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi FPK



Gambar 3.5  
Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Organisasi Kepemudaan, Pemuka Masyarakat, Dan Bagi Mahasiswa



Gambar 3.6 Kegiatan Pembentukan Karakter Bagi Usia Dini



## 2. Capaian Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kinerja program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2025 didasarkan atas capaian indikator kinerja persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif. Persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100,36%. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan coffee morning dengan ormas sebanyak 6 kali, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka menuju tata pengelolaan organisasi yang baik sebanyak 3 kali, kegiatan fasilitasi rapat monitoring penanganan ormas terafiliasi premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 kali, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah pada Kab/Kota yang menangani Subbidang Ormas sebanyak 2 kali, fasilitasi kegiatan Ngobrol Anti Korupsi (Ngopi) di Provinsi Kaltim sebanyak 1 kali, verifikasi data ormas se-kaltim sebanyak 2 kali, kegiatan podcast/talkshow dengan ormas sebanyak 3 kali, dan kegiatan Dialog dan Silaturahmi Ormas Keagamaan sebanyak 1 kali.

Gambar 3.7 Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas



Gambar 3.8 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam rangka menuju tata pengelolaan organisasi yang baik



Gambar 3.9 Kegiatan Fasilitasi Rapat Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi di Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.10 Kegiatan Ngobrol Anti Korupsi (Ngopi)



### 3. Capaian Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Kinerja program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 2025 didasarkan atas

capaian indikator kinerja persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Persentase ketercapaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Mediator bagi Tokoh Agama, Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya di Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Daerah, kegiatan Sosialisasi Pengembangan Teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN), Kegiatan Rapat Tim Terpadu Percepatan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Kaltim sebanyak 2 kali, dan kegiatan Dialog Kerukunan dan Moderasi Beragama.

Gambar 3.11 Kegiatan Pelatihan Mediator bagi Tokoh Agama



Gambar 3.12 Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya



Gambar 3.13 Kegiatan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Daerah



Gambar 3.14 Kegiatan Sosialisasi P4GN & PN kepada Pemuda, Tokoh Agama dan Ormas



Gambar 3.15 Kegiatan Rapat Tim Terpadu Percepatan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Kaltim



4. Capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Kinerja program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial pada tahun 2025 didasarkan atas capaian indikator kinerja persentase potensi konflik sosial yang ditangani. Persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Tim Terpadu Penangana Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Sosialisasi Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Timur, Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rapat FORKOPIMDA, Rapat Tim FKDM Provinsi Kalimantan Timur, Dialog Dalam Rangka Kerawanan Konflik, Rapat Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Provinsi Kalimantan Timur, Sosialisasi Penanganan Konflik di Kalangan Pelajar dan Pemuda, Rapat Tim Verifikasi dan Rekomendasi Keterangan Penelitian, FGD Pemetaan Potensi Konflik, Diseminasi Manajemen Konflik Bagi Aparatur Pemerintah di Wilayah Kalimantan Timur, FGD Penanganan Konflik, dan FGD Pemantauan Orang Asing.

Gambar 3.16 Kegiatan Rapat FORKOPIMDA



Gambar 3.17 Kegiatan Rapat Timdu PKS Prov.Kaltim



Gambar 3.18 Kegiatan Rapat Tim Wasdin Prov.Kaltim



Gambar 3.19 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Intelijen



Gambar 3.20 Kegiatan Rapat Tim FKDM



## 7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025,

dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.23  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	123,33%	78,95%	44,38%

Dengan tingkat serapan anggaran sebesar 78,95%, pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjukkan pengelolaan yang optimal. Capaian Jumlah potensi konflik Ipoeksosbud sebesar 69 atau 123,33% dari target yang ditetapkan mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya relatif efektif dalam mendukung peningkatan persatuan dan kesatuan masyarakat.

## 8. Rencana Tindak Lanjut/Perbaikan

- a. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mewujudkan pemenuhan aspek kebebasan, baik dengan perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, maupun unsur masyarakat lainnya.
- b. Lebih meningkatkan sinergitas dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial dan perekapan laporan potensi konflik di lapangan.
- c. Dalam upaya deteksi dini lebih mengoptimalkan peran forum bentukan pemerintah.
- d. Mengoptimalkan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan kepada pelajar dan masyarakat, memperdayakan rumah ibadah dan lembaga

pendidikan keagamaan sebagai tempat yang efektif dalam menyampaikan pesan perdamaian dan cinta NKRI.

- e. Menjalinkan komunikasi efektif dengan komunitas intelijen di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

### Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, meta indikator sebagai berikut:

Tabel 3.24  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Capaian IKM Kesbangpol
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Kesbangpol

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah, sebagai berikut:

#### a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

##### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.25  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,50	88,17	116,78%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah capain kinerja sebesar 116,78%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan kategori Sangat Baik dengan nilai SKM 88,17 sehingga dapat menunjukkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2025 tercapai dengan Sangat Baik. Nilai SKM semester I tahun 2025 sebesar 85,74 dengan jumlah responden sebanyak 157 orang, pada semester II tahun 2025 sebesar 90,60 dengan jumlah responden sebanyak 31 orang.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Untuk melihat kecenderungan capaian kinerja pelayanan, berikut disajikan perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.

Tabel 3.26  
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	91,78	88,17	-3,61%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai IKM mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 91,78 menjadi 88,17 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah berada pada kategori baik. Adanya penurunan mengindikasikan perlunya inovasi dan penguatan strategi pelayanan agar tren capaian kinerja dapat

kembali menunjukkan peningkatan yang lebih progresif pada periode mendatang.

### 3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2025 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	76,00	88,17	116,01%

Pada tabel 3.25 dapat dilihat bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, realisasi kinerja mencapai 88,17 dengan tingkat kemajuan 116,01%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Untuk memberikan gambaran mengenai posisi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap standar penilaian nasional, berikut disajikan interval nilai, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14/2017.

Tabel 3.28 Nilai Interval, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 - 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Berdasarkan ketentuan interval nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, nilai IKM

pada rentang 76,61 - 88,30 termasuk dalam kategori B dengan predikat kinerja Baik. Dengan capaian IKM Tahun 2025 sebesar 88,17, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur hampir memenuhi standar nasional mutu pelayanan publik dan berada pada kategori kinerja baik. Meskipun belum tersedia angka IKM nasional agregat Tahun 2025 sebagai pembanding langsung, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah mendekati dengan standar penilaian nasional dan berada pada level kinerja yang kompetitif. Namun demikian, untuk mencapai tingkat pelayanan yang lebih unggul, tetap diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan agar nilai IKM dapat bergerak lebih progresif pada periode berikutnya.

## 5. Faktor Pendukung dan Penghambat

### **Faktor Pendukung keberhasilan:**

Adanya komitmen yang kuat, baik di jajaran pimpinan maupun seluruh pegawai di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan transformasi/reformasi birokrasi

- a. Konsistensi standar pelayanan yang telah berjalan sesuai ketentuan dan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
- b. Biaya pelayanan yang transparan dan tanpa pungutan, tercermin dari nilai unsur biaya/tarif yang memperoleh nilai tertinggi (4,00).
- c. Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk dukungan sistem layanan berbasis digital.
- d. Kompetensi dan perilaku petugas yang baik, ditunjukkan dengan dominasi kategori Sangat Baik pada unsur kompetensi dan perilaku pelaksana.
- e. Pelaksanaan survei secara periodik, sehingga terdapat mekanisme evaluasi berkelanjutan.

### **Faktor Penghambat keberhasilan:**

- a. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.

- b. Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah didukung oleh keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.29 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,68	81,55	103,65%
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>96,75%</b>	<b>93,51%</b>	<b>96,65%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	55 orang	50 orang	90,91%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>35%</b>	<b>45,45%</b>	<b>129,87%</b>
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	2 laporan	2 laporan	100%

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		SKPD	SKPD			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	2,00	100,00%
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>33%</b>	<b>32,65%</b>	<b>98,95%</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	3 paket	100,00%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 dokumen	49 dokumen	81,67%
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 dokumen	49 dokumen	81,67%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 pegawai	1 pegawai	35,56%
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>95%</b>	<b>97,94%</b>	<b>103,09%</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	15 paket	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	100%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	20%
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	7 unit	100%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	100%
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>81,04%</b>	<b>81,04%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	1 unit	100%

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 unit	30 unit	49,18%
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 unit	5 unit	50%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja program Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan dan Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 persentase capaian indikator kinerja ini adalah masing-masing 103,65% dan 100%. Adapun program kerja yang termasuk ke dalam program ini, antara lain kegiatan kesekretariatan, yang di dalamnya mencakup kegiatan penyediaan operasional kantor serta kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yakni proses penghimpunan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan mempertahankan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan berbagai program dan kegiatan pendukung pelayanan, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik yang bertujuan untuk memperoleh penyempurnaan standar pelayanan yang diinginkan oleh penerima pelayanan sehingga diperoleh standar pelayanan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 3.21 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025



## 7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran terhadap pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 secara administratif tercatat pada program dan kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat. Meskipun demikian, penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian nilai IKM merupakan hasil kerja kolektif seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.30  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	116,64%	85,67%	30,97%

Berdasarkan tabel tersebut, pagu anggaran sebesar Rp 19.207.723.866,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.454.493.645,00 menunjukkan tingkat serapan anggaran sebesar 85,67%. Tingkat serapan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pelayanan publik telah berjalan secara optimal dan sesuai perencanaan.

Dengan capaian IKM sebesar 88,17 (kategori Baik), dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah mendukung pencapaian kinerja pelayanan secara efektif dan relatif efisien. Meskipun alokasi anggaran tercatat pada Sekretariat, manfaatnya dirasakan secara menyeluruh dalam proses pelayanan pada seluruh bidang, sehingga terdapat keterkaitan langsung antara dukungan sumber daya dan kualitas pelayanan yang dihasilkan.

Namun demikian, untuk mendorong peningkatan capaian IKM pada tahun berikutnya, diperlukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang lebih terarah pada unsur-unsur pelayanan dengan nilai relatif lebih rendah, khususnya aspek kecepatan waktu penyelesaian layanan.

## **8. Rencana Tindak Lanjut/Perbaikan**

- a. Mengembangkan sistem mekanisme dan prosedur yang praktis dan efisien dengan meningkatkan sistem mekanisme dan prosedur berupa sistem aplikasi untuk mempermudah pelayanan diantaranya website Kesbangpol dan aplikasi giok mas.
- b. Menyiapkan ruang konsultasi dan pengaduan di dalam standar pelayanan (pelayanan pengaduan).
- c. Perlu mempertahankan tingkat pelayanan yang sudah pada kategori sangat baik.
- d. Menyiapkan dukungan keuangan melalui penganggaran oleh bagian program.
- e. Meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.
- f. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public service)

dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

## b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.31  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	68,50	72,95	106,50%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas perangkat daerah capain kinerja sebesar 106,50%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas perangkat daerah diperoleh dari hasil penilaian dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 72,95 (tujuh puluh dua koma sembilan lima) atau dengan predikat penilaian "BB" dengan interpretasi "Sangat Baik".

Dengan demikian, secara umum tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah berada pada kategori baik, namun tetap memerlukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara lebih optimal.

### 2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Untuk melihat kecenderungan capaian kinerja pelayanan, berikut disajikan perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.

Tabel 3.32  
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah	70,20	72,95	2,75%

Untuk memahami faktor yang mempengaruhi capaian nilai AKIP tahun 2025 perlu dilakukan analisis masing-masing komponen penilaian sebagaimana hasil evaluasi Inspektorat Daerah atas implementasi SAKIP tahun 2024.

Tabel 3.33 Hasil Penilaian Per Komponen AKIP

No	Komponen Penilaian	Bobot	2025
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25
Total Nilai AKIP		100	72,95

#### 1) Perencanaan Kinerja (22,20 dari 30)

Komponen perencanaan kinerja menunjukkan capaian yang belum optimal. Dokumen perencanaan telah tersedia secara lengkap, diformalkan, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah memenuhi prinsip keterukuran (SMART).

Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek analisis perubahan sasaran strategis dan pendekatan *crosscutting* antar perangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan integrasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh

Dengan demikian, meskipun kualitas perencanaan telah berada pada kategori baik, peningkatan pada aspek integratif dan analitis masih diperlukan.

## 2) Pengukuran Kinerja (22,20 dari 30)

Pengukuran kinerja merupakan komponen penting dalam implementasi SAKIP karena berfungsi untuk memastikan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja dapat dipantau secara terukur, objektif, dan berkelanjutan.

Pengukuran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIAKIP yang memfasilitasi proses pengumpulan dan pemantauan data capaian kinerja secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam membangun sistem pengukuran yang terdokumentasi dan terstruktur.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, masih perlu diperhatikan diantaranya hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment kepada bidang dan pegawai, dalam pengisian belum sepenuhnya menjelaskan factor pendorong maupun penghambat serta belum menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi permasalahan pengukuran kinerja sebelumnya dan belum dilengkapi data capaian kinerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja dan realisasi anggaran secara berkala berlu terpadu sehingga belum dapat menggambarkan efisiensi dan efektivitas anggaran terhadap capaian masing-masing kinerja.

Dengan demikian, meskipun mekanisme pengukuran telah berjalan dan didukung oleh sistem informasi, penguatan pada aspek konsistensi data, validasi capaian, serta pemanfaatan hasil pengukuran sebagai alat kendali manajerial menjadi area perbaikan yang perlu diprioritaskan pada periode berikutnya.

## 3) Pelaporan Kinerja (12,30 dari 15)

Pelaporan kinerja telah dilaksanakan melalui penyusunan LKjIP yang diformalkan, direviu, dan disampaikan tepat waktu. Laporan kinerja juga telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan perbandingan data kinerja yang memadai beserta Upaya nyata dan/atau hambatannya.

Meskipun demikian, kualitas pelaporan masih memerlukan peningkatan, hasil reviu secara bernjang atas laporan LKjIP belum

sepenuhnya terinformasikan, dan penyajian informasi pembandingan dengan perangkat daerah sejenis di provinsi lain serta belum sepenuhnya menginfokan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Dengan demikian, aspek pelaporan tidak hanya dituntut memenuhi kelengkapan administrasi, tetapi juga harus memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan manajerial.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (16,25 dari 25)

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang dan didukung dengan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal/capaian sasaran/program/kegiatan yang dilaksanakan pada seluruh bidang/sub bidang/staf dan dilaksanakan secara berjenjang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian internal telah berjalan secara sistematis.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang nyata dalam perbaikan (rekomendasi) dan peningkatan kinerja.

### 3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2025 dengan Rencana Startegis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.34  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	69,00	72,95	105,72%

Pada tabel 3.34 dapat dilihat bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, realisasi kinerja mencapai 72,95 dengan tingkat kemajuan

105,72%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Penilaian Nilai AKIP secara nasional mengacu pada klasifikasi predikat dalam sistem evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Kategori nilai AKIP ditetapkan berdasarkan rentang skor evaluasi yang mencerminkan tingkat kematangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.35 Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Rentang Nilai	Predikat
1	2	3
1	>90-100	AA (Sangat Memuaskan)
2	>80-90	A (Memuaskan)
3	>70-80	BB (sangat Baik)
4	>60-70	B (Baik)
5	>50-60	CC (Cukup)
6	>30-50	C (Kurang)
7	>0-30	D (Sangat Kurang)

Bedasarkan hasil evaluasi Inspektorat, nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025 berada pada kategori “BB” (Sangat Baik). Dengan demikian, secara nasional capaian Nilai AKIP Kesbangpol telah mendekati kematangan implementasi SAKIP, namun tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja ke tingkat yang lebih tinggi.

#### 5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Capaian Nilai AKIP Tahun 2025 sebesar 72,95 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menjadi kendala

dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

**Faktor Pendukung keberhasilan Kinerja:**

- a. Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang Selaras  
Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja telah disusun secara sistematis dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga mendukung konsistensi perencanaan kinerja. Serta terjalinnya pola komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkup Pemda Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan instansi vertikal dalam upaya memaksimalkan proses perencanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja Badan Kesbangpol.
- b. Pemanfaatan Aplikasi SIAKIP  
Penggunaan aplikasi SIAKIP mempermudah proses monitoring dan pengendalian capaian kinerja secara berkala, serta meningkatkan transparansi dan dokumentasi pengukuran kinerja.
- c. Pelaksanaan Evaluasi Internal Berjenjang  
Evaluasi internal telah dilakukan secara berkala oleh unit terkait, sehingga mendukung proses pengendalian dan perbaikan kinerja.
- d. Komitmen Pimpinan terhadap Implementasi SAKIP  
Dukungan pimpinan dalam memastikan penyusunan dokumen dan pelaporan kinerja tepat waktu turut berkontribusi terhadap stabilitas capaian nilai AKIP pada kategori "BB".

**Faktor Penghambat keberhasilan Kinerja:**

- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja  
Hasil monitoring dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, kebijakan, maupun realokasi sumber daya.
- b. Konsistensi dan Stabilitas Data Pengukuran  
Masih terdapat ketidakkonsistenan antara data monitoring triwulan dengan data yang tersaji dalam aplikasi, yang berpotensi memengaruhi kualitas informasi kinerja.
- c. Kualitas Analisis dalam Pelaporan Kinerja

Penyajian analisis dalam laporan kinerja, termasuk benchmarking dengan perangkat daerah sejenis, masih perlu diperkuat agar memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan.

- d. Dampak Evaluasi Internal terhadap Perbaikan Kebijakan Rekomendasi hasil evaluasi internal belum sepenuhnya terdokumentasi secara komprehensif dan belum sepenuhnya diintegrasikan dalam perencanaan berikutnya.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.36  
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,63	78,84	100,27%
			Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	4 laporan	4 laporan	100%

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja program Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan dan Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti pada tahun

2025 persentase capaian indikator kinerja ini adalah masing-masing 100,27% dan 100%. Adapun program kerja yang termasuk ke dalam program ini, antara lain kegiatan kesekretariatan pada bagian perencanaan, yang di dalamnya mencakup kegiatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja. Adapun kegiatan yang mendukung capaian nilai AKIP, antara lain:

a. Kegiatan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra

Kegiatan ini meliputi penyusunan dan penyesuaian Renstra, Renja, serta Perjanjian Kinerja sesuai dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi. Penyelarasan indikator dan target kinerja dilakukan untuk memastikan keterukuran dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Kegiatan ini mendukung komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian AKIP, khususnya dalam memastikan keselarasan sasaran, indikator, dan target kinerja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta prinsip cascading kinerja.

Gambar 3.22  
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029



b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala melalui monitoring triwulan, reuview capaian indikator, serta pembahasan hasil capaian dalam forum internal. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, serta mengidentifikasi deviasi yang memerlukan tindak lanjut.

Gambar 3.23 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I-IV Tahun 2025



c. Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKjIP) dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahunan perangkat daerah. Proses penyusunan dilakukan melalui pengumpulan data capaian indikator, analisis perbandingan target dan realisasi, serta evaluasi atas faktor pendukung dan penghambat kinerja.

LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan kinerja organisasi. Kegiatan ini secara langsung mendukung komponen Pelaporan Kinerja dalam penilaian AKIP, khususnya dalam penyajian informasi kinerja yang transparan, akurat, dan berbasis analisis.

Gambar 3.24 Rapat Pembahasan Penyusunan dan Reviu Laporan Kinerja (LKJIP) Tahun 2025 sebagai bagian dari pemenuhan komponen Pelaporan Kinerja



d. Reviu Internal atas Implementasi SAKIP

Reviu internal atas implementasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan capaian kinerja yang dilaporkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan penyempurnaan.

Proses reviu dilakukan melalui pembahasan dan verifikasi data capaian indikator secara berjenjang di lingkungan Badan kepegawaian Daerah. Kegiatan ini memperkuat komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam penilaian AKIP.

Gambar 3.25 Rapat Reviu Internal atas Implementasi SAKIP



e. Pengelolaan dan Pemuktahiran Data Kinerja melalui Aplikasi E-SAKIP

Pengelolaan dan pemutakhiran data kinerja dilaksanakan melalui pemanfaatan aplikasi E-SAKIP guna memastikan ketersediaan, keterkinian, dan konsistensi data capaian indikator secara terdokumentasi dan transparan.

Pemanfaatan sistem informasi ini mendukung proses penginputan, monitoring, dan validasi data kinerja secara berkala, sehingga meminimalkan risiko ketidaksesuaian antara data monitoring dan pelaporan.

Kegiatan ini secara langsung mendukung komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja dalam penilaian AKIP, khususnya dalam menjamin keandalan dan akurasi informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan

Gambar 3.26 Kegiatan Pendampingan dan Validasi Pengisian Aplikasi E-SAKIP Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan pengelolaan data kinerja.



## 7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.37  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	116,64%	85,76%	30,88%

Dengan tingkat serapan anggaran sebesar 85,76%, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjukkan pengelolaan yang optimal. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebesar 72,95 atau 116,64% dari target yang ditetapkan mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya relatif efektif dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 8. Rencana Tindak Lanjut/Perbaikan

### a. Penguatan Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil monitoring dan evaluasi kinerja akan dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, perbaikan program/kegiatan, serta pengambilan keputusan manajerial. Mekanisme rewiu triwulan akan diformalkan melalui berita acara dan rekomendasi tindak lanjut yang terdokumentasi.

### b. Peningkatan Konsistensi dan Validasi Data Kinerja

Dilakukan standarisasi definisi operasional indikator serta penguatan proses validasi data sebelum penginputan pada aplikasi E-SAKIP untuk memastikan konsistensi antara monitoring internal dan pelaporan kinerja.

### c. Peningkatan Kualitas Analisis dalam LKJIP

Penyusunan LKJIP ke depan akan diperkuat dengan analisis yang lebih mendalam, termasuk penyajian benchmarking dengan perangkat daerah sejenis serta evaluasi efisiensi program/kegiatan.

### d. Optimalisasi Evaluasi Internal sebagai Instrumen Perbaikan

Hasil rewiu internal akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur dan dipantau secara berkala, sehingga evaluasi tidak hanya

bersifat prosedural tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja.

e. Penguatan Kapasitas Pengelola SAKIP

Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP melalui bimbingan teknis dan pembelajaran internal guna meningkatkan pemahaman terhadap prinsip manajemen kinerja berbasis hasil.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat meningkat secara kualitas dan konsistensi, sehingga target Nilai AKIP pada periode berikutnya dapat dicapai secara optimal serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

#### D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai satu Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan. antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.38  
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	78	85,68	109,85%	67.368.905.686	67.213.392.365	99,77%
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik lpoleksosbud	90	69	123,33%	15.218.917.412	12.014.886.699	78,95%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	75,50	88,17	122,37%	19.429.812.846	16.662.283.130	85,76%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	68,50	72,95	106,50%			
<b>Jumlah</b>						102.017.635.944	95.890.562.194	93,99%
<b>Total Belanja Modal</b>						<b>553.850.841</b>	<b>500.760.903</b>	<b>90,41%</b>

## 2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.39  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.429.812.846</b>	<b>16.662.283.130</b>	<b>85,76%</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.088.980	207.789.485	93,56%	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.892.808	3.283.000	47,63%	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	100%	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	100%	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.001.404	600.000	59,92%	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.194.768	203.906.485	95,20%	APBD
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	100%	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.492.668.750	10.405.481.893	83,29%	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.999.049.094	9.967.161.893	83,07%	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	486.360.000	438.320.000	90,12%	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.888.424	0	0,00%	APBD
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	741.404	0	0,00%	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.368.424	0	0,00%	APBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.261.404	0	0,00%	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	183.817.722	180.000.000	97,92%	APBD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	481.404	0	0,00%	APBD
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.370.702,00	180.000.000	99,79%	APBD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.482.808	0	0,00%	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.482.808	0	0,00%	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.277.712	15.000.000	40,24%	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	238.500	0	0,00%	APBD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481.404	0	0,00%	APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	481.404	0	0,00%	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.076.404	15.000.000	41,58%	APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.477.184.178	2.198.736.172	88,76%	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.386.618	1.599.510	67,02%	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	953.152.398	882.888.810	92,63%	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.635.120	37.965.600	28,84%	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.153.192.294	1.071.170.902	92,89%	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.521.404	0	0,00%	APBD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	235.296.344	205.111.350	87,17%	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.964.699.309	2.797.084.000	94,35%	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.799.504.441	2.638.134.000	94,24%	APBD
	Pengadaan Mebel	165.194.868	158.950.000	96,22%	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705.145.196	536.395.244	76,07%	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.034.000	20.000.000	99,83%	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.247.120	76.264.773	47,30%	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.864.076	440.130.471	84,02%	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.930.999	321.796.336	92,76%	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.741.999	70.448.757	96,85%	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.939.000	151.016.579	97,47%	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.400.000	17.331.000	68,23%	APBD
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	93.850.000	83.000.000	88,44%	APBD
<b>2</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>7.969.488.092</b>	<b>7.551.121.438</b>	<b>94,75%</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.969.488.092	7.551.121.438	94,75%	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.255.524.508	1.189.552.365	94,75%	APBD
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	66.045.616	62.816.870	95,11%	APBD
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	126.842.602	123.644.682	97,48%	APBD
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	127.082.106	126040000	99,18%	APBD
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1.757.696.242	1.709.118.010	97,24%	APBD
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	3.613.744.394	3.375.980.645	93,42%	APBD
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	251.247.000	222.072.320	88,39%	APBD
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	120.522.602	111.571.820	92,57%	APBD
	Pembentukan Paskibraka	650.783.022	630.324.726	96,86%	APBD
<b>3</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>67.368.905.686</b>	<b>67.213.392.365</b>	<b>99,77%</b>	<b>APBD</b>

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	67.368.905.686	67.213.392.365	99,77%	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	67.069.003.958	66.954.307.995	99,83%	APBD
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	299.901.728	259.084.370	86,39%	APBD
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>1.155.441.565</b>	<b>1.116.519.454</b>	<b>96,63%</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.155.441.565	1.116.519.454	96,63%	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.037.785.949	1.000.044.229	96,36%	APBD
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	117.655.616	116.475.225	99,00%	APBD
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>891.273.240</b>	<b>822.739.772</b>	<b>92,31%</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	891.273.240	822.739.772	92,31%	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	830.449.028	763.739.687	91,97%	APBD
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.824.212	59.000.085	97,00%	APBD
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>5.202.714.515</b>	<b>2.524.506.035</b>	<b>48,52%</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.202.714.515	2.524.506.035	48,52%	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	991.077.975	805.704.080	81,30%	APBD
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	167.400.000	151.148.300	90,29%	APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4.044.236.540	1.567.653.655	38,76%	APBD
	Total Belanja Daerah	102.017.635.944	95.890.562.194	93,99%	APBD

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi per program kegiatan diatas 93,99% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran melalui DPA Murni dan Perubahan sebesar Rp102.017.635.944,- yang terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp101.463.785.103,- yang diperuntukan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Proses penggunaan anggaran Belanja Operasi pada umumnya sudah berjalan sebagaimana jadwal yang direncanakan, hal ini terlihat dari realisasi penggunaan dana tidak mendapat kendala, realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp95.389.801.291,- atau 94,01%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp553.850.841,- dimana sampai dengan 31 Desember 2025 semua program kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%. Dan realisasi keuangan sebesar Rp500.760.903,- atau 90,41%.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuvi atas laporan kinerja instansi Pemerintah atas petunjuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Kaltim yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan kategori **Sangat Baik**, hasil laporan akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah rata-rata capaian sebesar 114,11%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan hasil yang optimal.

### **B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang antara lain yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan kelompok kerja dan forum kemitraan.
2. Kolaborasi lintas sektor dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal sebagai upaya preventif atas segala bentuk potensi instabilitas keamanan wilayah.

3. Upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada kalangan remaja melalui kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan pembentukan satuan tugas anti narkoba.
4. Upaya minimalisasi tindak pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan beragama di daerah yang dapat memicu timbulnya potensi konflik sosial.
5. Kolaborasi dengan berbagai elemen dalam rangka mengoptimalkan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan guna mengantisipasi dan menangkal gejala atau potensi yang akan mengarah kepada timbulnya disintegrasi bangsa.
6. Mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan Ormas di Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan keberdayaan dan kemandirian Ormas.
7. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, sehingga dapat mereduksi, mencegah, dan mengantisipasi segala kemungkinan negatif yang akan menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
9. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan di tahun-tahun mendatang.

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur

**Drs. Sufian Agus. M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196602041988031016



**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**